

EKONOMI SYARIAH

PERTEMUAN KE TIGA

KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH (2)

4. Etika Ekonomi dan Bisnis

Berkaitan dengan etika ekonomi dan bisnis Al Ghazali Qardawi (1997) mengemukakan mengenai etika ekonomi pada umumnya. Prinsip Etika tsb berkaitan dengan dasar2 yang dapat dijadikan pegangan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai kodrat dan aturan yang ada.

Prinsip2 itu anatara lain:

(1) **Prinsip Otonomi**, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Untuk bertindak

secara otonom, semestinya ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasar keputusan itu disertai dengan tanggung jawabnya. Kondisi ini dikarenakan manusia diberi kemampuan dalam terminologi fiqh disebut al-ahliyah baik dalam kapasitas *ahliyah al-wirjub* maupun *Al-ahliyah Al-ada*. Kemampuan yang sempurna memberikan tanggungjawab penuh pada pelaksanaan setiap aktivitas ekonomi. Kemampuan ini baru dapat berfungsi secara maksimal jika sikap otonomi dimiliki. Dalam kaitannya dengan sikap otonomi, sikap tanggungjawab penting, karena:

- a. Kesiediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bertanggungjawab berarti sikap seseorang terhadap tugas yang membebani instansi atau dirinya. Ia merasa terikat untuk menyelesaikannya, demi tugas itu sendiri.
- b. Sikap bertanggungjawab lebih tinggi daripada tuntutan etika atau peraturan yang hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap bertanggung jawab lebih terkait dengan nilai yang diemban atau akan dihasilkan.
- c. Wawasan orang yang bersedia untuk bertanggungjawab secara prinsip tidak terbatas. Ia tidak mem-

batasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, melainkan merasa bertanggungjawab di mana saja diperlukan.

- d. Kesediaan untuk bertanggungjawab termasuk kesediaan untuk diminta dan untuk memberi pertanggungjawaban atas tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

(2) **Prinsip Kejujuran.** Dasar setiap usaha untuk menjadi kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, manusia tidak men-

jadi dirinya sendiri. Tidak jujur berarti tidak seia-sekata dan itu berarti tidak seanggup mengambil sikap yang lurus.

Tanpa kejujuran, keutamaan moral lainnya akan hilang.

Bersikap baik terhadap lain, misalnya, tapi tanpa kejujuran, adalah kemunafikan dan tidak jarang beracun. Begitu pula sikap "*Sepi ing pamrih rame ing gawe*" menjadi sarana ke-licikan dan penipuan apabila tidak berakar dalam kejujuran.

Bersikap jujur pada orang lain memiliki 2(dua) arti:

(a) sikap terbuka dalam pengertian bahwa kita selalu muncul kita sebagai diri sendiri.

dalam segala sikap dan tindakan.

- (2) Sikap wajar atau fair yaitu memperlakukan orang menurut standar² yang diharapkan dan dipergunakan orang lain terhadap dirinya.

Menghormati orang lain, selalu memenuhi janji yang dibuatnya, juga terhadap orang yang tidak dalam posisi untuk menuntutnya, merupakan suatu keharusan dalam kejujuran. Orang yang tidak jujur senantiasa berada dalam pelarian. Ia lari dari dirinya sendiri, karena tidak berani menghadapi kenyataan yang sebenarnya.

Kejujuran dalam ekonomi Islam terwujud dalam berbagai aspek:

1. Kejujuran yang terwujud dalam pemenuhan syarat² perjanjian dan kontrak.
2. Kejujuran yang terwujud dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik.
3. Kejujuran menyangkut hubungan kerja.

Banyak ayat maupun hadits yang mengapresiasi kejujuran baik dalam porsinya sebagai etika secara ekstrinsip maupun intrinsik. Dalam hukum Islam, lawan jujur adalah curang. Al-Quran sangat melarang orang yang melakukan kecurangan termasuk dalam hal berekonomi (surat Al-Muthaffin: 1 : 3)

- (3) **Prinsip tidak berbuat jahat** (*non maleficence*) dan prinsip berbuat baik (*beneficence*). Prinsip bersikap baik bagi orang lain. Dalam wujudnya yang minimal dan pasif, sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Prinsip tidak berbuat jahat merupakan bagian dari sikap jujur. Al-Ghazali memahami arti kejujuran, yaitu tidak rela terhadap apa yang menimpa temannya kecuali yang rela jika hal itu menimpa dirinya sendiri.
- (4) **Prinsip hormat pada diri sendiri**, yaitu tidak etis jika seseorang membiarkan dirinya diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas dsb. Konsep ini diinduksi dari berbagai aktivitas ekonomi dengan mendapat keuntungan secara membabi buta tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan.

Kegagalan yang dihadapi sistem ekonomi konvensional baik yang kapitalis maupun sosialis banyak ditimbulkan oleh permasalahan yang terkait dengan prinsip kejujuran ini disamping ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan masyarakat dan ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang menimbulkan berbagai gejolak dalam kegiatannya. Konsep dasar keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan nilai-nilai luhur kemanusiaan telah membawa sistem ekonomi kapitalis lebih mengandalkan pada investasi serta pemilikan faktor produksi lainnya oleh swasta serta distribusi dan perkembangan tingkat kemakmuran juga diserahkan kepada individu, dan akibatnya

Perusahaan swasta berada dalam kondisi persaingan bebas yang sering memaksa manusia menjadi manusia mekanik yang segala tindakannya ditentukan dengan materi.

Harga dan nilai diri manusia kurang mendapat perhatian baik dalam sistem kapitalis maupun sosialis. Sistem sosialis telah gagal karena tidak dapat memenuhi kebutuhan2 pokok atau mengurangi secara substansi ketidakmerataan sosio-ekonomi kendati negara2 yang mengadopsi sistem ini memiliki sumber2 daya yang melimpah ruah. Sistem ekonomi sosialis yang mengandalkan kepentingan bersama (negara) di atas kepentingan individu (warga) telah menjadi mesin2 produksi yang bekerja tanpa memperhatikan hak dan harga diri individu.

Peranan Etika dalam Bisnis

Sejak dekade terakhir ini, berangsur-angsur mulai diakui pentingnya etika dalam bisnis dan karena itu serentak juga dalam pendidikan untuk profesi bisnis. Hal ini diperhatikannya bahwa bisnis berlangsung dalam konteks moral, konteks dengan agama terutama agama Islam. Kita mendengar Bank Syariah, Gadai Syariah, Muamalat dsb. Hal dapat dijadikan indikator bagi kita bahwa bisnis konvensional sudah mulai ditinggalkan seiring maraknya usaha-usaha berbasis ekonomi Islam, Ekonomi Syariah.

Kita sendiri sudah mulai berpikir ketika membeli sebuah produk atau jasa, akankah memberikkan hidup lebih nyaman?

1. Mitos mengenai bisnis amoral.

Dalam masyarakat acapkali beredar anggapan bahwa bisnis tidak ada hubungannya dengan etika atau moralitas, terlebih lagi dengan agama. Pebisnis hanya menjalankan pekerjaannya dengan satu tujuan, *profit oriented*. Richard de George menyebut pandangan ini *the myth of amoral business, bahwa bisnis itu amoral saja*. Dalam bisnis, orang menyibukan diri (*busy – sibuk*) dengan jual beli, produksi, merebut pasar, mencari untung sebesar-besarnya. Di sini orang tidak berurusan dengan agama, dengan etika atau dengan moral. Moralitas, agama menjadi urusan individu. Amoral tetapi tidak berarti imoral. Namun,

sekarang, mitos tersebut mulai ditinggalkan. Agama menjadi penyelamat bahwa bisnis harus berdasarkan syariah agama. Agama tidak mengajarkan hal2 yang melanggar etika, melanggar moral. Kini telah terbentuk keyakinan cukup mantap bahwa bisnis tidak terlepas dari segi2 moral. Bisnis tidak saja berurusan dengan angka penjualan atau *profit* pada akhir anggaran. *Good business* memiliki suatu makna moral berdasarkan keyakinan agama.

Menurut agama, sesudah kehidupan jasmani ini manusia hidup terus dalam alam baqa, di mana Allah SWT sebagai Hakim Maha Agung akan menghukum kejahatan yang pernah dilakukan dan mengganjar kebaikannya. Tidak mungkin terjadi *impunity* (sesuatu dibiarkan tak terhukum).

Pandangan ini didasarkan atas iman kepercayaan dan karena itu termasuk perspektif teologis, bukan perspektif sosiologis. Walaupun tentu sangat diharapkan setiap pelaku bisnis akan dibimbing oleh iman kepercayaannya, menjadi tugas agama (dan bukan etika filosofis) mengajak para pemeluknya untuk tetap berpegang pada motivasi moral ini.

Good ethichs, good business.

Memang benar pernyataan di atas membuat para pelaku bisnis bertanya apakah melakukan *Good ethichs, good business* akan memberikan keuntungan ? Kita hanya dapat melihat dengan pengalaman selama ini bahwa bisnis berbasis syariah pun ternyata makin memberikan kepercayaan yang makin baik dan juga

Bisnis dengan etika, dengan moralitas juga dengan berpatokan pada syariaah agama tetap memberikan keuntungan, dan perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Meskipun tetap juga diakui bahwa etika yang baik, kaidah agama yang dijalankan dengan benar selalu dan tanpa kecuali merupakan kunci untuk mencatat sukses dalam bisnis. Tidak mustahil bahwa perusahaan yang lebih etis mendapat keuntungan finansial kurang, dibanding dengan perusahaan yang tidak memperdulikan etika dan juga agama. (Contohnya anda tahu sendiri !).

Akhirnya, orang yang belum diyakinkan tentang pentingnya etika dan agama dalam bisnis, perlu mempertimbangkan

persepsi dunia luar tentang kinerja bisnis Indonesia. Dalam forum internasional, Indonesia dinilai termasuk negara yang paling korup. Hal ini sudah lama kita dengar dan baca dari media massa, sejak beberapa tahun ada cara yang lebih objektif lagi untuk memandangi kenyataan ini. Lembaga *Transparency International*, di Berlin, setiap tahun mempublikasikan *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi). Dalam indeks mereka, sudah beberapa tahun berturut-turut tampak bahwa Indonesia dipandang sebagai negara terkorup di dunia. Indonesia menempati urutan 97 dari 99 negara dengan skor 1,7 pada skala 10. Denmark menduduki peringkat pertama dengan skala 10, Singapura

Pada skala 7, Malaysia urutan ke 33 dan Philipina urutan ke 54. Jika kita sudah dininabobokan karena pengalaman rutin tiap hari, mungkin kita bisa tergugah dengan sorotan tajam dari luar negeri. Setelah kita membuka mata dengan sungguh², siapa dapat menyangkal lagi bahwa etika bisnis sangat mendesak untuk situasi kita yang amat memprihatinkan ini? Dan bagaimana kita dapat berhasil dalam globalisasi ekonomi dengan *track record* yang begitu jelek? “biaya siluman” yang membuat suatu ekonomi menjadi tidak efisien. Dengan demikian peluang bersaing mau tidak mau menjadi sangat sulit. Jika kekurangan moralitas dan agama dalam kegiatan ekonomi kita berlangsung terus.

5. Keadilan Berbisnis

Prinsip keadilan yang menuntut manusia memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya, konsep keadilan yang egaliter dan bukan yang absolut yang dimaksud di sini, sebab keadaan, meskipun secara bahasa berarti “*al-wash*” medium, dan tidak memihak, dalam wacana tertentu bersifat egaliter dan pihak lain bersifat absolut. Keadilan dalam arti egaliter menempatkan sifat demokratis dan dewasa dalam menghadapi beragam persoalan ekonomi, berbeda dengan keadilan yang absolut yang menempatkan otoritas di atas punggung keadilan itu sendiri. Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia.

Hal ini dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama sama. Tidak hanya itu, adil juga merupakan salah satu asma Allah. Kebalikan adil adalah sifat zhalim, suatu sifat yang dilarang oleh Allah pada diri-Nya sebagaimana dilarang dalam firman-Nya. *Allah menyukai keadilan dan sangat memusuhi kezhaliman, bahkan melaknatinya* ((Hud : 18).

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing2 mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau pak-

saan. Dengan kata lain, adil adalah kesadaran memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini, adil pada hakikatnya adalah bahwa seseorang memberikan kepada diri dan orang lain apa yang menjadi haknya. Karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya dihadapan Allah sebagai manusia, maka tuntutan paling dasar adalah perlakuan sama terhadap semua orang. Misalnya menjual barang harus memberikan harga yang sama kepada siapapun.

Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan 4(empat) hal:

- 1. Keadilan tukar menukar**
- 2. Keadilan distributif**
- 3. Keadilan sosial**
- 4. Keadilan hukum**

Ad. 1 : Keadilan dalam tukar menukar adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain, atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan tukar menukar, terjadilah saling memberi dan saling menerima.

Ad. 2 : Keadilan distributif merupakan suatu kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasanya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan cara rata dan merata menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani dan rohani. Hasil produksi tidak dibenarkan jika disalurkan pada satu atau dua daerah saja melainkan harus menyeluruh, sebab daerah lain juga membutuhkan hal serupa.

Ad. 3 : Keadilan Sosial merupakan suatu kebajikan tingkah laku manusia dalam hubungan dengan masyarakat, untuk senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan

kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir dari masyarakat atau negara.

Ad.4 : Keadilan hukum merupakan kebijakan yang mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan umum.

TERIMA KASIH